

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inflasi merupakan merosotnya nilai uang karena tingginya peredaran uang sehingga menyebabkan harga barang, jasa dan produksi meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi yang stabil merupakan hal krusial dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera (Bank Indonesia, 2020:1).

Inflasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya *demand pull inflation* yaitu tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa namun ketersediaan kurang. *Cosh pull inflation* yaitu tekanan dari sisi penawaran atau meningkatnya biaya produksi barang dan jasa yang disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, inflasi mitra dagang atau pasar global, kebijakan pemerintah terkait harga barang dan jasa dan faktor guncangan (*shock*) yaitu bencana alam atau gangguan pendistribusian barang dan jasa. *Built in inflation* atau ekspektasi inflasi yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi masa depan (Vetria, 2024: 43-45).

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil mengakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi membuat pendapatan masyarakat menurun sehingga standar hidup masyarakat ikut menurun. Ketidakpastian pelaku ekonomi dalam hal melakukan konsumsi, investasi dan produksi membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Inflasi dalam negeri yang lebih tinggi menjadikan tingkat bunga tidak kompetitif sehingga memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian inflasi yang berdasar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Bank Indonesia, 2020:5).

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi yaitu menetapkan kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak dan melakukan pinjaman. Menetapkan kebijakan moneter dengan meningkatkan nilai

suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan upaya kebijakan non fiskal dan non moneter berupa peningkatan hasil produksi, kemudahan akses barang impor, penetapan harga minimum serta pengawasan pendistribusian barang (Vetria, 2024: 44).

Berita resmi statistik BPS pada Januari 2025 menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IKH) Desember 2024 berada pada 1,57% YoY (*year-on-year*). Badan riset Bolasalju mencatat angka inflasi dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun dan terkendali yang mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Gambar 1 Inflasi Indonesia Tahun 2014-2023



Sumber: Bolasalju.com

Keadaan inflasi ini tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia diberikan mandat untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang kemudian dimaknai sebagai stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

Keberhasilan dalam pengendalian inflasi ini berkaitan dengan kolaborasi yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam ranah pengendalian inflasi telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sejak tahun 2005 (Bank Indonesia 2020:7). Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) adalah tim yang mengelola dan

menjaga stabilitas inflasi di tingkat nasional hingga daerah melalui berbagai kebijakan dan koordinasi antar lembaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum bagi penyelenggara otonomi daerah di Indonesia. Salah satu asas penting dalam otonomi daerah adalah asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur, bupati atau wali kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengendalikan inflasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 Tahun 2021 telah menetapkan sasaran inflasi IHK sebesar 3,0% untuk tahun 2022, 3,0% untuk tahun 2023 dan 2,5% untuk tahun 2024 dengan deviasi sebesar 1,0%. Sasaran inflasi ini kemudian menjadi target dalam upaya pengendalian inflasi untuk mendukung lahirnya stabilitas harga dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Inflasi di Indonesia sebagian besar disumbang oleh inflasi daerah (di luar Jakarta) dengan bobot inflasi sebesar 80,77% (POJAKNAS TPID 2014:15). Sulawesi Selatan pada 2024 mengalami inflasi sebesar 1,23% *year-on-year* dan penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,34%.

Pengendalian inflasi merupakan bagian dari pelaksanaan asas dekonsentrasi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan asas tersebut dituangkan dalam pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi di daerah berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah dengan kerja sama yang baik antara OPD dan mitra yang dilibatkan dalam program-program pengendalian inflasi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan perolehan penghargaan TPID *Awards* oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 1
Inflasi Antar Kab/Kota Sulsel 2024

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi <i>m-to-m (%)</i>	Inflasi <i>y-on-y (%)</i>
Kab. Wajo	106,41	0,08	0,68
Kab. Bulukumba	105,63	0,32	0,91
Kab. Sidrap	103,32	0,65	1,03
Kab. Bone	105,24	0,22	1,11
Kota Makassar	106,61	0,37	1,19
Kota Parepare	106,59	0,63	1,73
Kota Palopo	106,16	0,31	1,87
Kab. Luwu Timur	106,78	0,49	2,02

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Inflasi yang tinggi berdampak buruk pada aktivitas perekonomian masyarakat. Sementara dalam ekonomi makro inflasi yang terlalu rendah menimbulkan beberapa bahaya di antaranya pembelian dan investasi akan berkurang jika ekspektasi harga terus menurun, kombinasi antara harga jual dan upah nominal yang kaku dapat merusak keuntungan bisnis dan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga beban utang nominal semakin berat dan pembayaran utang semakin sulit bagi rumah tangga, perusahaan dan pemerintah (ECB,2020).

Keberhasilan TPID Kabupaten Bone tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, TPID Kabupaten Bone mampu merumuskan kebijakan berbasis data, memperkuat sistem logistik daerah serta menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Hal ini mencerminkan efektivitas sarana dekonsentrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Bone menarik untuk diteliti, mengingat minimnya kajian yang membahas keberhasilan TPID di Indonesia dari perspektif kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan strategi TPID Kabupaten Bone dalam pengendalian inflasi berjalan, serta faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi

dalam mendukung implementasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian terkait kebijakan TPID Kabupaten Bone dalam pengendalian inflasi tahun 2023 dan 2024 penting untuk dilakukan dengan judul penelitian “**Analisis Kebijakan dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bone**”.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana merosotnya nilai uang karena tingginya peredaran uang sehingga menyebabkan harga barang, jasa dan produksi meningkat. Suseno & Siti Astiyah (2009:3) menjelaskan terdapat dua kunci untuk memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga secara umum artinya inflasi perlu digambarkan dengan kenaikan harga sejumlah besar barang yang dikonsumsi dalam suatu perekonomian. Sedangkan terus-menerus adalah kenaikan harga yang disebabkan faktor eksternal secara musiman misalnya hari-hari besar yang mempengaruhi harga barang dan jasa secara terus menerus.

Pendapat lain mengenai inflasi adalah John Maynard Keynes dalam Suseno & Siti Astiyah (2009:9-10) bahwa inflasi tidak selalu menjadi hal yang negatif, utamanya dalam kondisi di mana kapasitas ekonomi belum mencapai tingkat optimal dan atau lapangan kerja penuh. Dalam situasi ini, peningkatan jumlah uang yang beredar justru dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan *output* ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja tanpa harus memicu kenaikan harga yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan perputaran uang dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perekonomian.

Pendekatan Keynesian menekankan bahwa uang tidak sepenuhnya bersifat netral. Artinya, penambahan uang beredar dapat memberikan pengaruh jangka panjang terhadap variabel-variabel riil, seperti tingkat produksi dan suku bunga. Dengan demikian, kebijakan moneter yang tepat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Keynesian juga mengkritisi asumsi teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa elastisitas dan kecepatan peredaran uang bersifat

tetap. Menurut mereka, faktor-faktor ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta keberadaan instrumen keuangan yang berfungsi sebagai uang substitusi. Dalam sistem keuangan yang maju, keberadaan berbagai instrumen keuangan membuat perputaran uang menjadi lebih dinamis dan sulit diprediksi, memberikan peluang untuk mengelola inflasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Inflasi di negara berkembang lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Pendekatan ini memberikan pandangan bahwa ada dua masalah utama yang menyebabkan inflasi di suatu negara, pertama, penerimaan dari ekspor sering kali bersifat tidak elastis. Hal ini berarti pertumbuhan nilai ekspor berjalan lebih lambat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Faktor-faktor seperti memburuknya persyaratan perdagangan dan kurangnya tanggung jawab produksi barang ekspor terhadap kenaikan harga menjadi penyebab utama. Lambatnya pertumbuhan ekspor ini mengurangi kemampuan negara untuk mengimpor barang-barang penting. Akibatnya, negara berkembang sering kali menerapkan kebijakan substitusi impor, meskipun biayanya tinggi. Kebijakan ini menyebabkan harga barang naik, yang pada akhirnya memicu inflasi.

Kedua, produksi bahan makanan dalam negeri sering kali tidak elastis. Pertumbuhan produksi pangan tidak mampu menyeimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan pendapatan per kapita. Akibatnya, harga makanan dalam negeri cenderung naik lebih cepat dibandingkan dengan harga barang lainnya. Kondisi ini memicu kenaikan upah dari pekerja sektor industri, yang kemudian meningkatkan biaya produksi dan mendorong terjadinya inflasi.

Selain itu, dalam praktiknya, proses inflasi di negara berkembang sering kali melibatkan unsur-unsur dari ketiga teori inflasi yang ada (Suseno & Siti Astiyah, 2009:10-11).

1.2.2. Pengendalian Inflasi

Inflasi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara seperti yang diuraikan sebelumnya. Berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan, maka setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Sementara itu tinggi rendahnya laju inflasi bersifat sangat relatif dan

berbeda antara suatu negara dengan negara lain bahkan kerap terjadi perbedaan persepsi dalam suatu perekonomian tentang inflasi yang dapat ditoleransi.

Klasifikasi laju inflasi dibagi menjadi laju inflasi moderat (sedang), tinggi, sangat tinggi (ekstrem) dan hiperinflasi (Dornbusch dan Fischer, 1993 dalam Suseno & Siti Astiyah, 2009:22). Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai tingkat inflasi yang dianggap rendah, seluruh negara di dunia sepakat bahwa inflasi bukanlah hal yang diinginkan dan perlu dikendalikan. Untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, diperlukan penerapan kebijakan ekonomi yang tepat. Secara umum, kebijakan utama yang digunakan untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kajian mengenai tren inflasi di Indonesia selama lima tahun terakhir (2019 – 2024) menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar. Bank Indonesia berperan signifikan dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, termasuk penetapan BI-Rate. Dinamika inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan domestik, nilai tukar, dan kebijakan global. Meski demikian, konsistensi kebijakan moneter serta upaya menjaga stabilitas makroekonomi menjadi elemen kunci dalam mengatasi dampak inflasi terhadap perekonomian, investasi, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga (Sekarsari D, 2024:2-9).

Di Indonesia, upaya pengendalian inflasi melibatkan tiga pihak utama. Pertama, Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia, yang bertindak berdasarkan amanat Undang–Undang 23 Tahun 2009. Kedua, Pemerintah, yang mencakup berbagai kementerian di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama pemerintah daerah. Ketiga, masyarakat secara luas, sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi (Saparuddin Siregar, 2014:3-4).

Pengendalian inflasi oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan ekonomi makro melalui pendekatan moneter dan fiskal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai target inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi agar tetap sejalan dengan tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang (Hermansyah, 2020:2-9).

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter telah dilakukan melalui penyempurnaan berbagai sistem yang bertujuan mengurangi ketidakpastian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama inflasi. Beberapa langkah konkret yang telah diterapkan meliputi penetapan sistem nilai tukar *crawling band*, penerapan *self-control* oleh bank-bank terhadap pembelian devisa dari Bank Indonesia, serta peningkatan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas perekonomian makro. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan salah satu model inflasi, yaitu model Vitaliano, pada kasus inflasi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel dalam model tersebut mampu menjelaskan perilaku inflasi di Indonesia (Agus Budi Sentosa, 2017:446).

Kolaborasi antar pemerintah diperlukan dalam pengendalian inflasi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan yang strategis yang berfokus pada empat pilar utama yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi (H. Yurianto, 2020:17-21).

1.2.3. Pemerintah

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar "perintah," yang memiliki arti menyuruh melakukan sesuatu, memberikan aba-aba, atau memberikan komando. Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut *government*, yang berasal dari kata Latin *gubernare* dan bahasa Yunani *kybernan*, yang memiliki makna mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum, pemerintah adalah sebuah organisasi, badan, atau lembaga yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan hukum serta peraturan di suatu wilayah tertentu (Ismail, 2017:9).

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua organisasi dan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam konteks tersebut pemerintah adalah seluruh perangkat yang bertugas mengatur, mengelola dan melayani kebutuhan masyarakat

termasuk institusi yang menyusun dan menegakkan hukum menjaga keamanan serta mengelola sumber daya negara untuk kepentingan bersama.

Sementara arti sempit, pemerintah mengacu hanya pada lembaga eksekutif yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam mengelola administrasi negara dan menjalankan kebijakan publik. Pemerintah dalam konteks ini biasanya merujuk pada kepala negara, kepala pemerintahan (seperti presiden, perdana menteri, atau gubernur), beserta kementerian atau departemen yang menjadi perangkat operasionalnya. Fokus utama pemerintah dalam arti sempit adalah pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan operasional pemerintahan sehari-hari.

Pemerintahan berdasarkan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 5 fungsi pemerintahan yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Fungsi pengaturan diterjemahkan menjadi upaya-upaya pemerintah dalam membuat undang–undang, kebijakan, peraturan daerah dan peraturan lainnya agar tercipta stabilitas dalam bernegara. Fungsi pelayanan mencakup layanan publik yang mengedepankan kesetaraan di antaranya pelayanan dalam hubungan eksternal berupa keadilan, perekonomian, agama, pertanahan dan masalah keamanan. Fungsi pembangunan yaitu tindakan–tindakan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengembangan infrastruktur di suatu wilayah secara merata. Fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Fungsi perlindungan dalam hal ini yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan hak-hak warga negara terpenuhi dengan membuat peraturan yang bersifat memaksa.

Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan ekonomi yang meliputi pengelolaan keuangan negara di mana presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan dan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas salah satunya menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003.

Pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal melalui arahan Presiden atau kesepakatan antara pemerintah dan DPR berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin melalui APBN, yang berfungsi untuk mengendalikan inflasi guna mencegah terjadinya krisis moneter, serta mendorong pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui APBN. Apabila APBN dikelola dengan tepat sesuai waktu dan konteks, inflasi dapat dikendalikan secara efektif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata pada tingkat makro, yaitu skala nasional.

1.2.3.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh kepala daerah dan perangkat daerah di suatu daerah. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup aspek ekonomi, termasuk pengendalian inflasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam mengatur kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk sektor ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan stabilitas harga dan inflasi.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2). Otonomi daerah sendiri bertumpu pada tiga asas utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam

mengatur kebijakan ekonomi daerahnya, sedangkan asas tugas pembantuan mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas tertentu. Namun, dalam konteks pengendalian inflasi, yang merupakan isu ekonomi makro yang tetap dalam kendali pemerintah pusat, asas yang lebih dominan adalah asas dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini menegaskan bahwa dalam isu-isu strategi seperti inflasi, pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kendali utama, tetapi pelaksanaan teknis di lapangan didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas kebijakan. Dalam konteks pengendalian inflasi, implementasi asas dekonsentrasi dilakukan melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi semakin diperjelas dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa dalam urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat tetap berwenang dalam kebijakan ekonomi makro, tetapi implementasi teknisnya didelegasikan ke daerah. Konsep ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengendalian inflasi bersifat nasional, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di tingkat daerah, yang berada di bawah kendali pemerintah daerah melalui TPID.

Keberadaan TPID sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan harga. Oleh karena itu, TPID Kabupaten Bone merupakan wujud nyata dari bagaimana asas dekonsentrasi bekerja dalam konteks pengendalian inflasi, dengan tugas utama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan

pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—yang dikenal sebagai empat pilar pengendalian inflasi.

Pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah juga tidak terlepas dari dinamika koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Bank Indonesia. Dalam hal ini, TPID bertindak sebagai unit koordinatif yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan kebijakan nasional yang diterapkan oleh Bank Indonesia serta Kementerian terkait. Dengan adanya asas dekonsentrasi, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga berjanji dalam merancang strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Keberhasilan Kabupaten Bone dalam mengendalikan inflasi pada tahun 2023 dan 2024 tidak terlepas dari peran TPID dalam menerapkan asas dekonsentrasi secara efektif. Penghargaan TPID *Awards* yang diterima Kabupaten Bone merupakan indikator bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang menuntut sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi sangat erat hubungannya dengan asas dekonsentrasi yang memungkinkan implementasi kebijakan ekonomi nasional di tingkat daerah. Dalam hal ini, TPID berfungsi sebagai instrumen strategi yang memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Keberhasilan TPID Kabupaten Bone dalam mengendalikan inflasi selama dua tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa koordinasi antartingkat pemerintahan, pemanfaatan kewenangan daerah, serta penerapan kebijakan yang tepat mampu menciptakan stabilitas inflasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

1.2.4. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) adalah tim yang bertugas untuk mengelola dan menjaga stabilitas inflasi di tingkat daerah maupun nasional melalui berbagai kebijakan dan koordinasi antar lembaga.

Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) merupakan bagian dari struktur Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 23 Tahun 2017. TPIP memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, pengendalian, serta pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, TPIP bertanggung jawab menyelesaikan hambatan serta permasalahan terkait pengendalian inflasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian sasaran inflasi.

TPIP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua I, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua II, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua III. Keanggotaan TPIP terdiri dari menteri-menteri terkait, kepala lembaga negara, serta pejabat tinggi lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang perekonomian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, TPIP juga melibatkan kementerian, lembaga, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memastikan sinergi kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif. Biaya operasional TPIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber lain yang sah.

1.2.5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Nasional, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017. TPID terdiri atas dua tingkat, yaitu TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. TPID bertugas untuk menjalankan pengendalian inflasi di tingkat daerah sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

TPID Provinsi memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan harga barang kebutuhan pokok di tingkat provinsi, menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional, memperkuat sistem logistik, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan inflasi di tingkat provinsi. TPID

Provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai ketua, dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia sebagai wakil ketua. Keanggotaan TPID Provinsi mencakup pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan isu inflasi, dan kebijakannya diatur melalui Keputusan Gubernur.

TPID Kabupaten/Kota bertugas untuk mengumpulkan data harga di wilayahnya, menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta memperkuat sistem logistik lokal. Tim ini juga bertugas mengidentifikasi masalah dan menyusun langkah penyelesaian terkait inflasi di tingkat kabupaten/kota. TPID Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, dengan pejabat Bank Indonesia sebagai wakil ketua. Susunan keanggotaan ditentukan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPID melakukan koordinasi melalui forum rapat yang melibatkan TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota. Forum ini meliputi rapat koordinasi nasional, koordinasi pusat-daerah, hingga rapat antar daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pengendalian inflasi. Selain itu, laporan hasil pelaksanaan tugas TPID disampaikan secara berkala kepada TPIP melalui mekanisme yang telah ditentukan.

TPID memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, TPID memastikan bahwa setiap daerah memiliki kebijakan pengendalian inflasi yang sesuai dengan kondisi lokalnya. Hal ini memungkinkan distribusi barang kebutuhan pokok yang lebih efisien, pengurangan volatilitas harga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

TPID menerapkan strategi 4 pilar dalam pengendalian inflasi. Program tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

- a. Keterjangkauan harga mengacu pada serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memastikan harga barang dan jasa tetap berada pada tingkat yang wajar dan stabil.
- b. Ketersediaan pasokan berfokus pada jaminan ketersediaan pasokan barang dan jasa di berbagai wilayah dan waktu sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu inflasi.

- c. Kelancaran distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa dapat tersalurkan dengan efisien dari produsen ke konsumen, mengurangi biaya logistik, serta menghindari keterlambatan dalam rantai pasokan.
- d. Komunikasi efektif bertujuan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap stabil. Komunikasi yang efektif ke publik dilakukan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja dan tidak terpengaruh oleh spekulasi harga yang dapat memicu kepanikan di pasar.

Strategi ini menjadi dasar bagi kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penerapan yang sinergis dan efektif, daya beli masyarakat tetap terjaga serta stabilitas ekonomi nasional dapat terus terpelihara (TPIP, 2019: 19-78).

1.2.6. Analisis Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang memiliki hubungan satu sama lain dan diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau publik. Kebijakan ini bersifat mengikat dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pelayanan publik, ketertiban, atau penyelesaian masalah di masyarakat. Kebijakan publik berperan penting dengan tujuan utama memberikan pelayanan publik. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan tercapainya pertahanan negara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal. Selain itu, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada pelayanan publik semata, tetapi juga harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam serta menyelaraskan perbedaan tersebut demi menetapkan prioritas yang mendesak dan mendukung kepentingan bersama secara lebih luas (Dewi Kusuma, 2022:1-2).

Menurut Anggara (2014) dalam Dewi Kusuma (2022:2-3), kebijakan dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Ketetapan, yaitu aturan atau ketentuan yang memiliki sifat mengikat dalam sebuah kebijakan.
- b. Maksud, yakni kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

- c. Keputusan, yaitu pilihan yang dapat diimplementasikan atau tidak, bergantung pada kepentingannya.
- d. Proses, yakni pelaksanaan dari berbagai hal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam buku Techjan (2006,39-40) terdapat model analisis kebijakan dalam pengimplementasiannya dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn 1975 yang kemudian disebut sebagai *a Model of the Policy Implementation Process*. Terdapat variabel-variabel yang saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan Merujuk pada ukuran atau pedoman yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Standar kebijakan mencakup ketentuan normatif, peraturan, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pelaksana kebijakan. Sementara itu, sasaran kebijakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Sumber daya
Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, teknis, dan informasi yang tersedia bagi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan aparatur yang kompeten, pendanaan yang memadai, serta akses terhadap data dan informasi yang akurat.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
Karakteristik pelaksana mencakup struktur kelembagaan, sistem koordinasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi dalam menjalankan kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki birokrasi yang efisien, sistem koordinasi yang baik, serta mekanisme pengambilan keputusan yang fleksibel lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Komunikasi antarorganisasi merupakan faktor yang menentukan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah,

Bank Indonesia, instansi terkait, dan pelaku usaha sangat penting untuk memastikan kelancaran penerapan kebijakan pengendalian inflasi. Kualitas komunikasi dapat diukur melalui kejelasan proses kebijakan, mekanisme, serta kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

e. Sikap para pelaksana

Sikap pelaksana mencerminkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan komitmen dari aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Variabel ini mengacu pada bagaimana para pelaksana kebijakan, baik individu maupun organisasi, menanggapi kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam mendukung, netral, ataupun menolak kebijakan tersebut .

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Variabel yang dideskripsikan oleh Van Meter dan Van Horn, 1975 kemudian digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses dan faktor apa yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Bone khususnya pada tahun 2023 dan 2024.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Bone dalam mengendalikan inflasi?
2. Apa faktor yang mendukung keberhasilan TPID Kabupaten Bone dalam meraih penghargaan pada tahun 2023 dan 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Bone dalam mengendalikan inflasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan TPID Kabupaten Bone dalam meraih penghargaan pada tahun 2023 dan 2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini akan memberikan referensi dalam kajian analisis kebijakan publik terkait pengendalian inflasi tingkat daerah, memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan yang inovatif dapat mendukung keberhasilan program pemerintah di tingkat lokal serta menjadi dasar peneliti lain untuk mengembangkan studi serupa di wilayah lain dalam sektor kebijakan khususnya terkait Tim Pengendali Inflasi Daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan daerah lain untuk mengadopsi kebijakan dan strategi TPID Kabupaten Bone dalam pengendalian inflasi, dapat menjadi rekomendasi untuk efektivitas kebijakan di masa depan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengendalian inflasi yang berdampak pada stabilitas perekonomian.

2. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara metodologis dengan menjadi referensi dalam penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, khususnya dalam kajian kebijakan publik terkait pengendalian inflasi di tingkat daerah. Melalui penerapan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang terstruktur berdasarkan empat pilar pengendalian inflasi dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana data kualitatif dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara efektif. Hasil penelitian ini, dapat menjadi contoh praktis bagi penelitian berikutnya yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan daerah yang kompleks.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode penghitungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dengan mengumpulkan data dari lingkungan alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Wekke Suardi, dkk, 2019:35). Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan umumnya menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna yang didasarkan pada perspektif subjek.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memanfaatkan beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi partisipan, dokumentasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh berupa kata-kata, narasi, kutipan, gambar, atau rekaman suara yang menggambarkan pengalaman dan pandangan individu maupun kelompok.

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, termasuk data faktual yang dapat divalidasi dan dianalisis secara mendalam. Pendekatan ini memberikan peluang untuk memperoleh informasi yang mendalam, terutama melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai aktor utama dalam pengumpulan data dengan berinteraksi langsung dengan objek penelitian.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone serta *stakeholder* yang berperan dalam mencapai keberhasilan TPID di tahun 2023 dan tahun 2024.

Pelaksanaan penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih hingga 2 (dua) bulan. Mulai dari pemenuhan izin riset hingga tahap penyusunan laporan penelitian.

2.3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan informasi yang mumpuni agar memperoleh data yang akurat mengenai strategi TPID Kabupaten Bone dalam mengendalikan inflasi hingga faktor pendukung keberhasilan TPID dalam meraih penghargaan tahun 2023 dan tahun 2024.

2.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informan penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* agar peneliti dapat memilih informan berdasarkan tujuan perolehan informasi yang diinginkan.

2.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya kemudian diperoleh melalui seseorang ataupun lembaga lain untuk tujuan lain dan digunakan kembali untuk keperluan penelitian (Wahidmurni, 2017:8-10).

2.4. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini akan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan informan yang berdasarkan kriteria yang diperlukan dan telah ditentukan dalam penelitian (Wekke Suardi, dkk, 2019:323). Penentuan informan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diperlukan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2 Informan Penelitian

No.	Informan	Peran	Status	Jumlah
1.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bone	Sekretaris TPID Kabupaten Bone	Informan kunci	1
2.	Dinas Ketahanan Pangan Bone	Anggota TPID	Informan pendukung	1

Sumber: Penulis, 2025

2.5. Teknik Pengumpulan Data

2.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti (sebagai pewawancara) dan individu yang menjadi responden. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai topik penelitian berdasarkan perspektif responden.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, atau ketika peneliti membutuhkan informasi mendalam dari responden dengan jumlah yang relatif kecil. Teknik ini didasarkan pada laporan diri (*self-report*), serta pada pengetahuan atau keyakinan pribadi responden (Sugiyono, 2013:137-138).

Penelitian ini akan disiapkan dengan berbagai macam pertanyaan yang telah dipertimbangkan dan disesuaikan berdasarkan informasi yang dibutuhkan dari setiap narasumber dan empat pilar pengendalian inflasi (4K) merupakan indikator dari setiap pertanyaan yang disajikan, di antaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.

2.5.2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan wawancara dan kuesioner. Berbeda dengan wawancara dan kuesioner yang selalu melibatkan komunikasi dengan manusia, observasi mencakup pengamatan terhadap berbagai objek, termasuk fenomena alam (Sugiyono, 2013:145). Dalam buku yang sama, menurut Sutrisno Hadi tahun 1986, observasi merupakan proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, dengan pengamatan dan ingatan sebagai dua elemen utamanya.

2.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara visual, verbal atau tulisan. Zuriah (2009) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen berfungsi

sebagai catatan aktivitas, peristiwa, atau kegiatan masa lalu yang telah terdokumentasikan dan disimpan dalam bentuk arsip. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

2.6. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif memandang fenomena secara holistik, yaitu menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada variabel tertentu, melainkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini, batasan masalah dikenal dengan istilah fokus, yang merujuk pada pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2013:207).

Berdasarkan pendapat di atas, agar proses penelitian lebih terstruktur maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bone berdasarkan indikator empat pilar pengendalian inflasi (4K) merupakan indikator dari setiap pertanyaan yang disajikan, di antaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.
 - a. Keterjangkauan harga mengacu pada serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memastikan harga barang dan jasa tetap berada pada tingkat yang wajar dan stabil.
 - b. Ketersediaan pasokan berfokus pada jaminan ketersediaan pasokan barang dan jasa di berbagai wilayah dan waktu sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu inflasi.
 - c. Kelancaran distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa dapat tersalurkan dengan efisien dari produsen ke konsumen, mengurangi biaya logistik, serta menghindari keterlambatan dalam rantai pasokan.
 - d. Komunikasi efektif bertujuan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap stabil. Komunikasi yang efektif ke publik dilakukan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja dan tidak terpengaruh oleh spekulasi harga yang dapat memicu kepanikan di pasar.
2. Faktor pendukung keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bone dalam meraih penghargaan pada tahun 2023 dan

tahun 2024 menggunakan model analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang kemudian disebut sebagai *a Model of the Policy Implementation Process*. Terdapat variabel-variabel yang saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan merujuk pada ukuran atau pedoman yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Standar kebijakan mencakup ketentuan normatif, peraturan, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pelaksana kebijakan. Sementara itu, sasaran kebijakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks pengendalian inflasi oleh TPID, standar kebijakan yang ditetapkan berdasarkan regulasi nasional, seperti target inflasi tahunan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah pusat. Sasaran kebijakan TPID Kabupaten Bone adalah menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah.
- b. Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, teknis, dan informasi yang tersedia bagi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan aparatur yang kompeten, pendanaan yang memadai, serta akses terhadap data dan informasi yang akurat. Dalam pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Bone membutuhkan dukungan teknis dari Bank Indonesia, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta sumber daya finansial untuk menjalankan berbagai program stabilisasi harga dan logistik. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas kebijakan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur kelembagaan, sistem koordinasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi dalam menjalankan kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki birokrasi yang efisien, sistem koordinasi yang baik, serta mekanisme pengambilan keputusan yang fleksibel lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Dalam konteks TPID Kabupaten Bone, struktur organisasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait berperan penting dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Fleksibilitas organisasi dalam merespons dinamika pasar serta kesiapan dalam menghadapi gangguan distribusi merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

- d. Komunikasi antar organisasi pelaksana merupakan faktor yang menentukan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi terkait, dan pelaku usaha sangat penting dalam memastikan kelancaran penerapan kebijakan pengendalian inflasi. Kualitas komunikasi dapat diukur melalui kejelasan proses kebijakan, mekanisme, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan TPID, komunikasi yang terstruktur antara TPID Kabupaten Bone, TPID Provinsi, dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti krisis pasokan dan volatilitas harga.

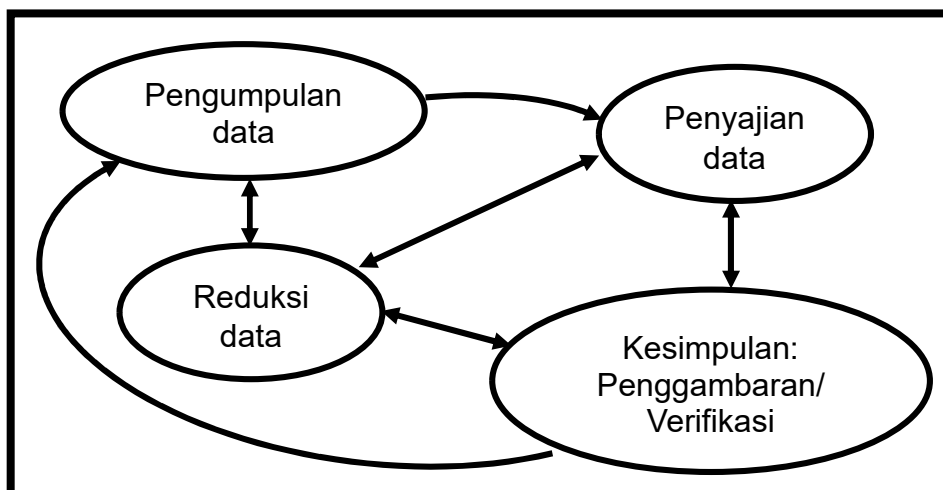
Variabel yang dideskripsikan oleh Van Meter dan Van Horn, 1975 kemudian digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses dan faktor apa yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Bone khususnya pada tahun 2023 dan 2024.

2.7. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:246), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh. Proses analisis data meliputi tiga aktivitas utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Setelah data dikumpulkan,

peneliti terlebih dahulu melakukan antisipasi sebelum melanjutkan ke tahap reduksi data.

Gambar 2 Alur Analisis Data



Sumber: Sugiyono, 2013:247

2.7.1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Seiring berjalannya waktu, semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan bertambah, menjadi semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih informasi yang relevan, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mengidentifikasi tema dan pola. Proses ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data jika diperlukan. Untuk mendukung reduksi data, dapat digunakan perangkat elektronik, seperti komputer, dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2013:247).

2.7.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian ini membantu mengorganisasi data, menyusun pola hubungan, dan mempermudah pemahaman. Dengan menyajikan data, peneliti dapat lebih mudah memahami situasi yang terjadi dan

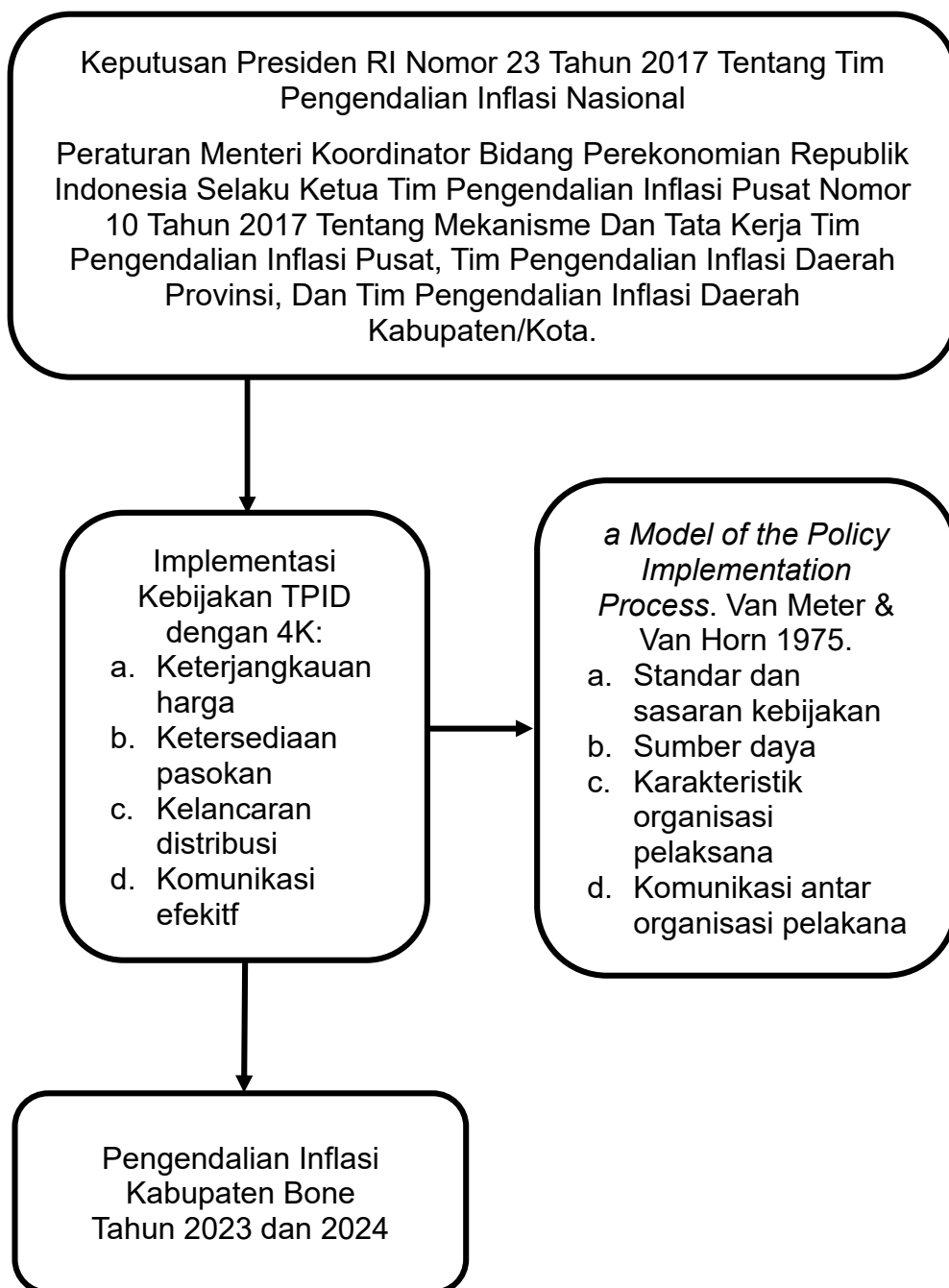
merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2013:246).

2.7.1. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:252), proses terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat biasanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

2.8. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 3
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis, 2025